

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE : BETWEEN PROFIT AND ETHICS

Rice

Program Studi Akuntansi STIE Mikroskil
Jl Thamrin No. 112, 124, 144 Medan 20212
rice.lee@mikroskil.ac.id

Abstrak

Penelitian mengenai kinerja, manajemen laba, audit, saham terasa sudah sangat banyak dilakukan. Mungkin disebabkan karena adanya pandangan bahwa tujuan utama perusahaan adalah mensejahterakan pemilikinya melalui pencapaian laba. Namun terkadang kita lupa bahwa dalam memperoleh laba, pihak yang tidak kalah penting menjadi perhatian perusahaan adalah masyarakat sekitarnya. Karena perusahaan terbentuk atas dasar kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Sehingga diperlukan perhatian dari perusahaan yang diimplementasikan melalui tanggungjawab sosial yang dilakukan. Berdasarkan uraian artikel dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak motivasi yang dapat mempengaruhi tindakan manajer perusahaan melakukan pengungkapan. Dan disadari juga bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan di Indonesia masih sangat rendah sekali. Oleh sebab itu, dengan artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam membantu menyusun peraturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pengungkapan, khususnya pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, sehingga dapat segera mengganti dari yang bersifat *voluntary* ke *mandatory*.

Keywords: *corporate social responsibility disclosure*

1. Pendahuluan

Ide dasar dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah bahwa bisnis harus bertindak dan bertanggungjawab lebih dari sekedar tanggungjawab secara hukum kepada pemegang saham, karyawan, pemasok dan pelanggan. Namun bisnis diharapkan untuk mengakui dan mengambil tanggungjawab penuh atau konsekuensi non-ekonomi kepada masyarakat luas dan lingkungan alam, yang tidak memerlukan peraturan undang-undang dalam mengatur (Fred Robins, 2005) [1].

Namun bagi perusahaan, pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility disclosure/CSR*) masih menjadi perdebatan antara bersifat wajib atau sukarela. Dari satu sisi, penerapan tanggungjawab sosial perusahaan merupakan suatu beban, di mana dengan ikutserta dalam kegiatan sosial, jumlah laba dapat mengalami penurunan. Namun perlu diketahui juga, dengan meminimalkan atau bahkan menghindari kegiatan sosial dapat menimbulkan dampak-dampak daripada menghematan biaya yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lovink Angel Dwi Karina, Etna Nur Afri Yuyetta (2013) [2] bahwa setiap perusahaan pasti memiliki orientasi untuk memperoleh laba bagi perusahaannya, untuk itu perusahaan berusaha untuk membangun citra yang baik di masyarakat dengan memberikan

perhatiannya kepada lingkungan atau tanggung jawab sosial, yang lebih dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Di samping itu, kegiatan bisnis terutama yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam baik secara langsung maupun yang tidak langsung tentu memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya seperti masalah-masalah polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Adanya dampak pada lingkungan tersebut mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) (Marzully Nur dan Denies Priantinah, 2012) [3]. Dan ternyata investor di seluruh dunia menuntut informasi yang mendetail dan berkala, tingkat pengungkapan sukarela meningkatkan negara dengan pasar yang telah maju dan baru muncul (Frederick D.S. Choi and Gary K. Meek, 2010) [4].

Namun akibat ingin melakukan penghematan biaya, perusahaan dapat saja meminimalkan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, yang lebih disebabkan karena adanya bentrokan kepentingan. Bukan hanya di Indonesia, pengungkapan *corporate social responsibility* khususnya perusahaan non keuangan pada negara Arab Saudi contohnya ternyata masih tergolong rendah, hanya 24% namun sudah mengalami peningkatan sebagai akibat penerapan *corporate governance*. Hasil ini ditemukan oleh Murya Habbash (2016) [5].

Dalam teori akuntansi positif dijelaskan bahwa terdapat tiga hipotesis yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu *bonus plan hypothesis*, *debt/equity hypothesis*, dan *political cost hypothesis* sebagaimana diungkapkan oleh Watts and Zimmerman di tahun 1986 (Markus J. Milne, 2001) [6].

Teori Akuntansi Positif dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRSD)

Markus J. Milne (2001) [6] melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Watts and Zimmerman (1986) berpendapat bahwa manajer dari perusahaan yang memiliki laba tinggi cenderung akan menggunakan kekuasaan monopoli dalam melakukan pemilihan metode akuntansi untuk tujuan menurunkan laba untuk menghindari pengungkapan tanggungjawab sosial cenderung bersifat lemah, dan bahkan berpendapat bahwa diperlunya pengkajian kembali hubungan antara teori akuntansi positif dengan tanggungjawab sosial perusahaan.

Namun penelitian Bryan Hong, *et al* (2015) [7] berhasil menemukan bukti bahwa pemegang saham lebih menyukai memberikan kompensasi kepada perusahaan yang melakukan kegiatan sosial, dan bahkan tata kelola perusahaan menjadi dasar penilaian pemberian insentif untuk kinerja sosial dan kinerja sosial menjadi penentang biaya agensi. Di samping itu, pelaporan tanggungjawab sosial menjadi model di antara semua perusahaan besar multinasional (Frederick D.S. Choi and Gary K. Meek, 2010) [4]. Hal ini didukung oleh penelitian J. Hasseldine, *et al* (2007) [8] yang menyatakan bahwa para perusahaan multinasional yang banyak terdapat investor asing, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara keikutsertaan investor asing, risiko politik dari masing-masing negara dan kepekaan terhadap lingkungan sosial terhadap CSRSD oleh perusahaan multinasional.

Penelitian Rene Orij (2007) [9] melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa teori litigasi merupakan teori yang paling penting dalam pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Mohamed A. Omran dan Dineshwar Ramdhony (2015) [10] melakukan penelitian yang lebih kepada kondisi perspektif teori litigasi, teori stakeholder, teori kontrak sosial, dan teori sinyal terhadap CSRSD. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa tidak adanya teori universal yang berlaku untuk pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan tersebut. Namun teori yang paling mendukung kepada CSRSD adalah teori litigasi, sedangkan teori stakeholder lebih kepada akuntabilitas CSRSD.

Semakin tingginya harapan konsumen, karyawan, investor, mitra bisnis dan masyarakat lokal akan peran perusahaan telah meningkat. Sehingga pihak perusahaan dituntut untuk semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun terdapat bukti hasil penelitian bahwa adanya perbedaan hubungan antara teori keagenan, teori kepemilikan, teori litigasi terhadap CSRD oleh perusahaan dari waktu ke waktu (Toukabri Mohamed, *et al*, 2014) [11].

Investor di seluruh dunia menuntut informasi yang mendetail dan berkala, tingkat pengungkapan sukarela meningkatkan negara dengan pasar telah manu dan baru muncul. Namun menurut beberapa pihak, laporan keuangan bisa menjadi mekanisme cacat untuk berkomunikasi dengan investor dari luar ketika insentif manajer tidak sebanding dengan bunga dari semua pemegang saham. Frederick D.S. Choi and Gary K. Meek (2010) [4] berpendapat bahwa komunikasi manajer dengan investor tidak sempurna ketika : (1) manajer memiliki informasi kuat tentang perusahaan mereka, (2) insentif manajer tidak sesuai dengan bunga dari semua pemegang saham, (3) peraturan akuntansi dan audit tidak sempurna. Terdapat bukti-bukti kuat mengindikasikan bahwa manajer perusahaan sering memiliki insentif yang besar untuk menunda pengungkapan kabar buruk, “mengatur” laporan keuangan mereka untuk memastikan kesan perusahaan yang lebih positif, dan menekankan keadaan dan prospek keuangan perusahaan. Sehingga untuk melindungi investor, sebagian besar bursa sekuritas dan pemerintah telah menentukan laporan dan kebutuhan pengungkapan domestik dan asing yang mencari akses untuk pasar mereka.

Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure

Sadia Majeed, *et al* (2015) [12] menyatakan bahwa adanya pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan ukuran direksi, konsentrasi kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Namun umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Dan mekanisme tata kelola perusahaan lainnya seperti kualitas audit, struktur dewan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Serta diharapkan juga perusahaan dapat meningkatkan nilai saham dan profitabilitas untuk dapat meningkatkan reputasi guna memberikan daya tarik bagi investor (Marwa Abdel Razek, 2014) [13].

Namun sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Murya Habbash (2016) [5] yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga dan pemerintah, ukuran perusahaan dan umur perusahaan dapat menjadi faktor dalam menentukan CSRD. Sedangkan jenis industri bukanlah faktor penentu dalam menentukan CSRD. Selain itu, penelitian Shujie Yao, *et al* (2011) [14] berhasil menemukan bukti bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan, paparan media, konsentrasi kepemilikan terhadap CSRD pada perusahaan di China, terlebih bagi perusahaan yang peka terhadap lingkungan cenderung melakukan CSRD yang lebih banyak. Namun untuk umur perusahaan justru tidak terdapat pengaruhnya terhadap CSRD.

Toto Rusmanto, *et al* (2014) [15] melakukan penelitian namun tidak berhasil memperoleh bukti bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara tata kelola perusahaan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, khususnya pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45. Di samping itu ternyata perusahaan yang melaporkan tanggungjawab sosialnya masih tergolong kecil, yaitu hanya 41% dari jumlah perusahaan.

Studi ini mencoba untuk memulai menyabarkan apa sebenarnya tanggungjawab sosial perusahaan itu sendiri, yang diikuti dengan seberapa pentingkah tanggungjawab sosial dilakukan perusahaan serta pro dan kontra dalam penerapan tanggungjawab sosial. Dan berdiskusi mengenai penerapan tanggungjawab sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan di Indonesia, yang akan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan.

2. Konsep *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Telah banyak kita membahas hasil-hasil dan pendapat peneliti mengenai CSRD, namun apa itu sebenarnya CSRD sendiri dan seberapa penting penerapan dan ikutserta perusahaan dalam melakukan kinerja sosial masih menjadi pertanyaan besar. Secara konsep, pengertian dari *Corporate Social Responsibility* masih belum memiliki keseragaman. The World Business Council for Sustainable Development merumuskan pengertian dari CSR yaitu :

The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society

Definisi mengenai CSR berdasarkan pengertian yang diadopsi oleh Uni Eropa juga dijabarkan oleh Fred Robins (2005) [1] :

“CSR is a concept where by companies integrate social and environmental concern in their business operations and stakeholder relations on a voluntary basis; it is about managing companies in a socially responsible manner.”

Di samping itu, Gray, *et al* (1995) [16] mendefinisikan bahwa pengungkapan CSR merupakan suatu proses penyediaan informasi yang dirancang untuk mengemukakan masalah seputar akuntabilitas sosial, yang secara khusus diuraikan dalam laporan keuangan perusahaan.

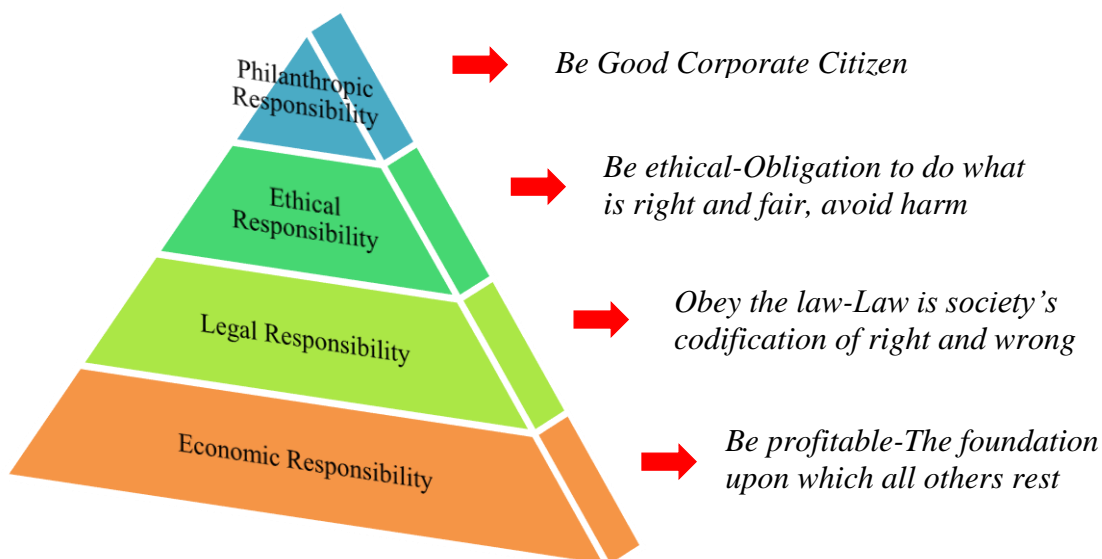
Yusuf Babatunde Adeneye and Maryam Ahmed (2015) [17] mendefinisikan istilah CSR menjadi kemampuan perusahaan untuk bertanggungjawab sosial terhadap pertumbuhan dan perkembangan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Hal ini mengindikasikan adanya layanan sosial yang bersifat sukarela yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat. Sebagai dampaknya adalah peningkatan perilaku dalam pembelian dan citra baik perusahaan di mata masyarakat. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial masyarakat telah dapat meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik daripada perusahaan yang hanya mengangap kegiatan sosial sebagai isu belaka.

Dari definisi-definisi yang telah dijabarkan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep dari CSR sebenarnya adalah implikasi dari 3 fungsi perusahaan, sebagaimana lebih mendekati konsep yang dijabarkan oleh Elkington, antara lain :

1. Fungsi ekonomi, yang merupakan fungsi tradisional perusahaan. Di mana untuk memperoleh keuntungan (*profit*) bagi perusahaan (yang sebenarnya merupakan keuntungan pemilik perusahaan).
2. Fungsi sosial, merupakan fungsi yang dijalankan dengan memberdayakan sumber daya manusia dan ikut serta dalam menjaga keadilan dalam membagi manfaat dan menanggung beban yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan.
3. Fungsi alamiah, merupakan fungsi yang menyatakan bahwa perusahaan berperan dalam menjaga kelestarian alam (planet/bumi). Perusahaan merupakan elemen dalam sistem kehidupan di bumi.

Archie B. Carroll (1979) [18] berpendapat bahwa tanggungjawab sosial perusahaan meliputi ekonomi, hukum, etika, dan harapan dari masyarakat pada waktu tertentu. Archie B. Carroll (1991) [19] mencoba menjabarkan beberapa jenis tanggungjawab sosial sebuah perusahaan yang dituangkan ke dalam sebuah piramida bernama piramida tanggungjawab sosial perusahaan. Piramida berarti hirarki tanggungjawab yang bergerak dari ekonomi dan hukum berdasarkan orientasi sosial yang etis. Archie B. Carroll berpendapat bahwa perusahaan yang merupakan unit dasar dari kegiatan ekonomi memiliki tanggungjawab terhadap alam.

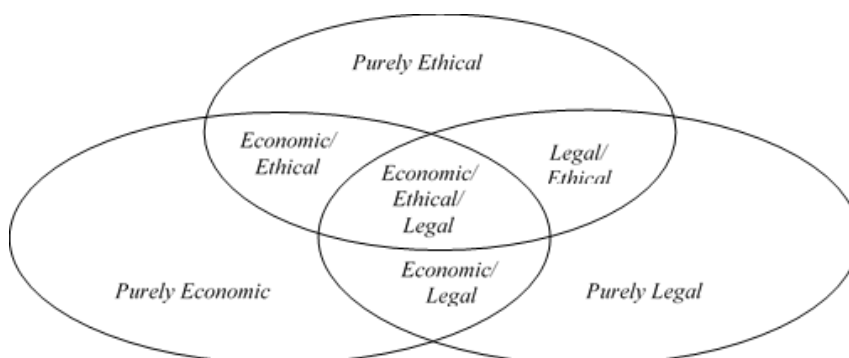
Berikut adalah piramida CSR yang dikembangkan oleh Archie B. Carroll di tahun 1991, sebagaimana tampak di bawah ini :



Gambar 1. Piramida Corporate Social Responsibility Carroll
Sumber : Archie B. Carroll, 1991

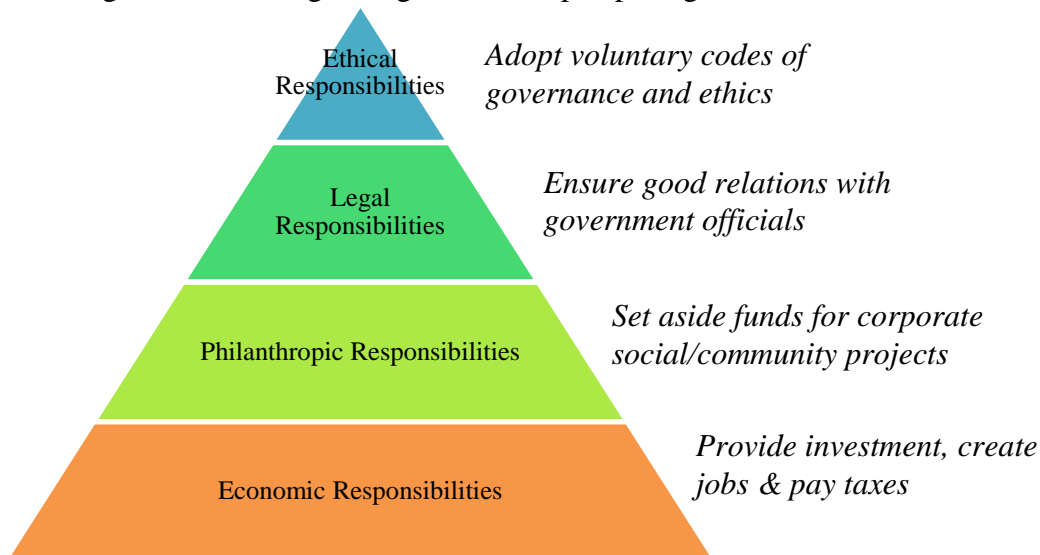
Tanggungjawab ekonomi merupakan tanggungjawab yang paling mendasar bagi sebuah organisasi bisnis. Tanggungjawab ekonomi menunjukkan bahwa perusahaan diharapkan dapat menghasilkan barang dan jasa dan memperoleh keuntungan sebagai insentif atas efisiensi dan efektifitasnya. Sedangkan tanggungjawab hukum merupakan harapan di mana perusahaan dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan main yang berlaku. Kedua tanggungjawab tersebut merupakan tanggungjawab yang paling mendasar bagi perusahaan, di mana diikuti dengan tanggungjawab etika dalam menjalankan usahanya (Dima Jamali, *et al*, 2008) [20].

Di tahun 2003, Mark S. Schwartz and Archie B. Carroll [21] mencoba untuk meninjau kembali keterbatasan dari piramida Carroll yang sudah terbentuk di tahun 1991. Pertama, hirarki piramida carroll menunjukkan bahwa domain piramida lebih penting dibandingkan dengan pangkal piramida. Sehingga tidak sesuai dengan teori jenis prioritas yang sebagaimana menurut Carroll. Sehingga terdapat usulan mengenai konsep dari CSR ke dalam 3 model (tanggungjawab ekonomi, hukum dan etika). Ketiga model dari CSR tersebut tergambar di bawah ini :



Gambar 2. Model Tiga domain Corporate Social Responsibility
Sumber : Mark S. Schwartz and Archie B. Carroll, 2003

Wayne Visser (2006) [22] berpendapat bahwa urutan lapisan CSR untuk negara berkembang berbeda dengan urutan lapisan yang dikembangkan oleh Carroll di tahun 1991. Di negara berkembang, tanggungjawab ekonomi masih mendapat tekanan dari tanggungjawab philanthoropy dan tanggungjawab hukum dan etika berada di puncak yang tertinggi. Hal ini disebabkan karena budaya tradisional secara langsung dapat meningkatkan kondisi ekonomi di negara tersebut, sedangkan tekanan untuk mematuhi hukum lebih sedikit dibandingkan dengan negara maju. Wayne Visser mencoba mengembangkan piramida yang khusus menggambarkan CSR negara berkembang, sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini :



Gambar 3. Piramida Corporate Social Responsibility untuk Negara Berkembang
Sumber : Wayne Visser, 2006

Namun dalam proses pelaporan CSR di dalam laporan keuangan, terdapat beberapa standar yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Di mana terdapat 7 kategori yang harus dipenuhi oleh perusahaan, antara lain : lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan kerja, tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan hal-hal umum lainnya. Sedangkan oleh Darwin (2004) [23] membagi kategori CSR menjadi kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial, yang hampir sama dengan standar yang dikemukakan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) yang merupakan badan yang aktif dalam mengembangkan pedoman pengungkapan CSR bagi perusahaan.

Petunjuk pertahanan laporan sosial dan keuangan yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) telah sangat bagus dijabarkan oleh Frederick D.S. Choi and Gary K. Meek (2010) [4]. Pola kerja GRI menyarankan adanya indikator pengungkapan kinerja di area :

1. Performa ekonomi, seperti upah, pajak, dan sumbangan komunitas.
2. Performa lingkungan, seperti rumah kaca,emisi gas dan penggunaan air.
3. Performa sosial, secara spesifik diuraikan menjadi :
 - a. Praktik buruh, seperti kesehatan dan keamanan pekerja, pelatihan dan pemisahan tugas.
 - b. Hak asasi manusia, seperti kebijakan non-diskriminasi, pekerja di bawah umur dan hak-hak pribumi.
 - c. Masyarakat, seperti pengaruh komunitas, sogokan, dan kontribusi politik
 - d. Tanggungjawab produk, seperti kesehatan dan keamanan pelanggan, periklanan, dan privasi konsumen.

Dengan terus meningkatnya tuntutan bagi perusahaan untuk memberikan jawaban secara luas mengenai “pemegang saham”-pegawai, pelanggan, penyedia, pemerintah, kelompok aktivis, dan masyarakat umum-yang sangat berpengaruh daripada kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi. Laporan pertanggungjawaban sosial mengacu pada pengukuran dan komunikasi informasi tentang pengaruh perusahaan terhadap kemakmuran pegawai, komunitas sosial dan lingkungan. Hal ini mencerminkan sebuah kepercayaan bahwa perusahaan bergantung pada pemegang saham dalam laporan tahunan kinerja terhadap lingkungan dan sosial mereka seperti halnya laporan keuangan yang mereka berikan pada pemegang saham (Frederick D.S. Choi dan Gary K. Meek, 2010) [4].

Pentingkah *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan?

Kesadaran akan pentingnya penerapan *corporate social responsibility* berawal dari semakin maraknya pencemaran lingkungan, baik air, udara, dan lainnya, sehingga semakin diharapkan munculnya produk-produk yang ramah lingkungan oleh masyarakat luas. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sofyan Syafri Harahap (2008) [24], bahwa perusahaan tidak bisa seenaknya lagi untuk mengelola resorsis demi kepentingan kapitalis tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.

Salah satu tujuan pengungkapan CSR adalah untuk mencerminkan akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi perusahaan kepada investor dan stakeholder lainnya guna menjalin komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan pihak publik. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2004) paragraf ke 9 secara jelas menyampaikan saran pembuat kebijakan mengenai pengungkapan CSR bagi perusahaan, yang berbunyi :

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa para pembuat kebijakan turut serta dalam mendukung penerapan CSR bagi perusahaan. Namun pengungkapan CSR menurut PSAK masih bersifat sebagai informasi tambahan, yang akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang menerapkannya.

Praktik pengungkapan laporan keuangan tahunan memperlihatkan respons manajer terhadap kebutuhan pengaturan dan insentif mereka untuk menyediakan informasi laporan keuangan secara sukarela kepada pengguna. Di belahan dunia, pengungkapan bermakna kecil dan pengawasan serta pelaksanaan (praktiknya) sukarela, karena manajer perusahaan tidak akan patuh dengan peraturan pengungkapan jika kepatuhan lebih menguras biaya daripada biaya non-kepatuhan yang diharapkan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk membedakan dengan jelas antara pengungkapan yang “dibutuhkan” dan pengungkapan yang sebenarnya dibuat (Frederick D.S. Choi dan Gary K. Meek, 2010:183) [4].

3. Pro Dan Kontra Atas Praktik *Corporate Social Responsibility*

Meskipun penerapan dan pengungkapan CSR dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan, namun masih terdapat pro dan kontra atas penerapan CSR. Bagi kelompok perusahaan yang berorientasi pada pencapaian laba dan bukan bergabung dalam kelompok organisasi sosial, berpendapat bahwa penerapan CSR bukanlah sesuatu hal yang wajib dilakukan, hal ini disebabkan karena perusahaan memang benar telah memperoleh laba, namun di samping itu, perusahaan juga telah membayar pajak kepada negara, dan karenanya

tanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan publik seharusnya sudah diambilalih oleh pihak pemerintah. Dengan penerimaan pajak, sudah sewajarnya pemerintah menggunakan penerimaan tersebut untuk pengembangan negara yang nantinya akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun berbeda lagi bagi kelompok perusahaan yang mendukung penerapan CSR. Bagi kelompok perusahaan ini, tujuan utama perusahaan tidaklah salah adalah untuk memperoleh laba guna meningkatkan kesejahteraan pemiliknya. Namun janganlah lupa juga perusahaan merupakan organisasi yang terbentuk atas dasar persetujuan masyarakat, sehingga diharapkan dapat menaruh perhatian terhadap kepedulian masyarakat disekitarnya. Namun bagi perusahaan yang menerapkan CSR dapat menyebabkan kehilangan terhadap nilai kesukarelaan dalam setiap aktivitas CSR. Sehingga diharapkan juga perusahaan untuk lebih berfokus terlebih dahulu mencari laba, karena laba merupakan salah satu sumber dana dalam melakukan CSR.

Berikut uraian ringkasan pro dan kontrak dari penerapan CSR di perusahaan sebagaimana menurut Ahmed Belkaoui, SEA, 1984 yang dijabarkan oleh Sofyan Syafri Harahap (2008) [24], antara lain :

a. *Pro Corporate Social Responsibility*

1. Keterlibatan sosial merupakan respon terhadap keinginan dan harapan masyarakat terhadap peranan perusahaan. Dalam jangka panjang, dapat menguntungkan perusahaan
2. Keterlibatan sosial mungkin akan mempengaruhi perbaikan lingkungan, masyarakat, yang mungkin akan menurunkan biaya produksi
3. Meningkatkan nama baik perusahaan, akan menimbulkan simpati langganan, simpati karyawan, investor dan lain-lain
4. Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat
5. Dapat menunjukkan respon positif perusahaan terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sehingga mendapat simpati masyarakat
6. Sesuai dengan keinginan para pemegang saham, dalam hal ini adalah publik.
7. Mengurangi tensi kebencian masyarakat kepada perusahaan yang kadang-kadang suatu kegiatan yang dibenci masyarakat tidak mungkin dihindari
8. Membantu kepentingan nasional, seperti konservasi alam, pemeliharaan barang seni budaya, peningkatan pendidikan rakyat, lapangan kerja dan lain-lain

b. *Kontra Corporate Social Responsibility*

1. Mengalihkan perhatian perusahaan dari tujuan utamanya dalam mencari laba, sehingga hal ini adalah pemborosan
2. Memungkinkan keterlibatan perusahaan terhadap permainan kekuasaan atau politik secara berlebihan yang sebenarnya bukan lapangannya
3. Dapat menimbulkan lingkungan lingkungan bisnis yang monolistik bukan yang pluralistik
4. Keterlibatan sosial memerlukan dana dan tenaga yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi oleh dana perusahaan yang terbatas, yang dapat menimbulkan kebangkrutan atau menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan
5. Keterlibatan pada kegiatan sosial yang demikian kompleks memerlukan tenaga dan tenaga ahli yang belum tentu disediakan oleh perusahaan.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Sebagaimana telah dijabarkan oleh Frederick D.S. Choi dan Gary K. Meek (2010) [4] dalam bukunya “ International Accounting”, untuk melindungi investor, sebagian besar bursa sekuritas (bersama dengan lembaga peraturan profesional dan pemerintah seperti halnya komisi

pertukaran dan sekuritas Amerika Serikat dan agen pelayanan keuangan di Jepang) menentukan laporan dan kebutuhan pengungkapan pada perusahaan domestik dan asing untuk mencari akses untuk pasar mereka.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa ternyata pengungkapan CSR perusahaan manufaktur di Inggris melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial yang hanya sebesar 46,8% (Yusuf Babatunde Adeneye and Maryam Ahmed (2015) [17]. Sedangkan di Arab Saudi hanya berkisar 24% (Murya Habbash (2016) [5]. Dan di Indonesia sendiri oleh perusahaan publik masih juga tergolong rendah, hanya berkisar 30% dari item-item yang wajib diungkapkan, di mana pada umumnya tertuang menjadi satu bagian dalam laporan keuangan, yaitu pada bagian *sustainability report*. Dan khusus untuk perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 hanya sebesar 41%. Rendahnya tingkat pengungkapan disebabkan karena masih kurang peraturan-peraturan yang berfokus pada penekanan-penekanan item-item yang wajib diungkapkan. Sehingga diharapkan pihak pembuat kebijakan dapat merancang suatu peraturan khusus yang berisi peraturan-peraturan dalam melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial yang harus dilakukan.

Referensi

- [1] Robins, F., 2005, *The Future of Corporate Social Responsibility*, Asian Business & Management, page 95-115.
- [2] Karina, L. A. D., dan Etna Nur Afri Yuyetta, 2013, *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility*, ejournal Uninvestitas Diponegoro, Volume 2, Nomor 2, Universitas Diponegoro, Semarang, hal 1-12.
- [3] Nur, M., and Denies Priantinah, 2012, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan Berkategori High Profile yang Listing di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Nominal, Vol. 1, No. 1, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- [4] Choi, F. D. S., dan Gary K. Meek, 2010, *International Accounting*, Penerjemah : M. Yusuf Hamdan, Buku 1, Edisi 6, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- [5] Habbash, M., 2016, *Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure : Evidence From Suadi Arabia*, Journal of Economic and Social Development, Vol 3, No. 1., page 87-103.
- [6] Milne, M. J., 2001, *Positive Accounting Theory, Political Cost and Social Disclosure Analyses : A Critical Look*, BAA Annual Conferen at the University of Nottingham, page 1-19.
- [7] Hong, B., Zhichuan (Frank) Li, and Dylan Minor, 2015, *Corporate Governance and Executive Compensation for Corporate Social Responsibility*, Working Paper 16-014, *Journal of Business Ethics*, page 1-24.
- [8] Hasseldine, J., H. Massoud, J. S. Toms, 2007, *Political, Social and Economic Determinants of Corporate Social Responsibility by Multi-nasional Firms in Environmentally Sensitive Industries*, Working Paper No. 28, The York Management School, University of York.
- [9] Orij, R., 2007, *Corporate Social Disclosure and Accounting Theories An Investigation*, 30th Annual Congress of the European Accounting Association, Lisbon, page 1-23.
- [10] Omran, M. A., and Dineshwar Ramdhony, 2015, *Theoretical Perspectives on Corporate Social Responsibility Disclosure : A Critical Review*, International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol. 5, No. 2, Macrothink Institute, page 38-55.

- [11] Mohamed, T., Ben Jemaa Olfa, and Jilani Faouzi, 2014, *Corporate Social Disclosure : Explanatory Theories and Conceptual Framework*, International Journal of Academic Research in Management (IJARM), Vol. 3., No. 2., page 208-225.
- [12] Majeed, S., Tariq Aziz and Saba Saleem, 2015, *The Effect of Corporate Governance Element on Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure : An Empirical Evidence from Listed Companies at KSE Pakistan*, International Journal of Financial Studies, 3, page 530-556.
- [13] Razek, M. A., 2014, *The Association between Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance - A Survey of Egypt*, Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 5, No. 1, IISTE.
- [14] Yao, S., Jianling Wang, and Lin Song, 2011, *Determinants of Social Responsibility Disclosure by Chinese Firms*, Discussion Paper 72, The University of Nottingham, China Policy Institute. Page 1-30.
- [15] Rusmanto, T., Stephanus Remond Waworuntu, Valina Purnama Syahbandiah, 2014, *The Impact of Corporate Governance on Corporate Social Responsibility Disclosure : Evidence from Indonesia*, Proceedings Book of ICETSR, Malaysia.
- [16] Gray, R., Kouhy, R., and Lavers, S., 1995, *Constructing A Research Database of Social and Environmental Reporting by UK Companies*, Accounting, Auditing and Accountability Journal, 8, 47-77.
- [17] Adeneye, Y. B and Maryam Ahmed, 2015, *Corporate Social Responsibility and Company Performance*, Journal of Business Studies Quartely, Vol. 7, No. 1.
- [18] Carroll A. B., 1979, *A Three Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance*, Academy of Management Review, Vol. 4, 4, page 497-505.
- [19] Carroll, A. B., 1991, *The Pyramid of Corporate Social Responsibility : Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders*, Business Horizons, Vol. 34, 4, page 39-48.
- [20] Jamali, D., Asem M. Safieddine, and Myriam Rabbath, 2008, *Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Synergis and Interrelationships*, Croporate Governance : An International Review, Vol. 16, Issue 5, page 443-459.
- [21] Schwartz M. S., and Archie B. Carroll, 2003, *Corporate Social Responsibility : A Three-Domain Approach*, Business Ethics Quarterly, Vo. 13, No. 4, page 503-530.
- [22] Visser, W., 2006, *Revisiting Carroll's CSR Pyramid : An African Perspective*, In E. R. Pedersen and M. Huniche (eds), *Corporate Citizenship in Developing Countries*, Copenhagen, Copenhagen Business School Press, 29-56.
- [23] Darwin, A., 2004, *Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia*, Konvensi Nasional Akuntansi V, Program Profesi Lanjutan, Yogyakarta.
- [24] Harahap, S. S., 2008, *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi 10, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.